



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH**
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 10 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baru RT 07, RW 04, Kelurahan Kasturian, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RAHMAN MAHFUD, SH., SAID TEAPON, SH., YULIA DEWANTY MAHFUD, SH., .Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office MAHFUD & PARTNERS yang beralamat di Jalan Ketilang / Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Sentiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 yang telah di daftar di kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 372/ SK.HK.01/12/2020/PN.Tte. tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 26 Maret 2021 Nomor 1/Pid.TPK/2021/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi ini serta berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/Q.2.5/Ft.1/11/ 2020 tanggal 14 Nopember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA (*tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TELAH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SECARA MELAWAN HUKUM yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Tidak menyetorkan ke kas daerah atas penerimaan uang pajak kendaraan bermotor bulan Februari s/d Mei 2018, dari sebanyak 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Kendaraan bermotor yang telah diterbitkan.
2. Melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan dengan cara :
 - a. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 (kendaraan Baru) serta mengalihkan Nilai yang sudah di kurangi ke biaya Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 (mutasi);
 - b. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 (kendaraan Baru) merubah seolah kendaraan lama atau menjadi biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor lama;
 - c. Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi;
 - d. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 (mutasi) dan mengurangi nilai Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan yang dimutusikan;
 - e. Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas biaya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang.
3. Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan bermotor baru roda 4 dan kendaraan roda 2.

Perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH bersama dengan saksi ISMIWATI KODA telah bertentangan dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 ayat (4), Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
- d) Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bahwa terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH secara melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah MEMPERKAYA DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN yaitu saksi ISMIWATY KODA dengan mendapatkan pengasilan yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian penerimaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara dari hasil pajak kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp. 632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), atas perbuatan yang dilakukannya, dengan cara dan rincian sebagai berikut :

1. Tidak menyertakan ke kas daerah atas penerimaan uang pajak kendaraan bermotor periode bulan Februari 2018 s/d Mei 2018, dari 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan seluruhnya sebesar Rp. 186.717,509,- (seratus delapan puluh enam ratus tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah);
2. Melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, dengan hasil uang yang diperoleh seluruhnya sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutasi dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
3. Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari dealer akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Bahwa untuk menghilangkan, merubah dan mengurangi nilai biaya yang tercantum pada lembar ke-4 dan lembar ke-2 dalam Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor, terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA, pada kurun waktu tahun 2018 seringkali memerintahkan saksi HARYANTO yang bekerja sebagai pegawai Honorer pada kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan tugas sehari-hari sebagai pembantu bendahara penerima untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1, 3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, sekaligus dengan catatan angka biaya yang berbeda antara lembar 1, 3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mekanisme rangkap Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (satu) kendaraan bermotor yaitu :

- Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
- Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
- Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
- Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
- Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.

Bahwa setiap hari atas penerimaan keuangan dari pajak kendaraan bermotor yang di terima oleh UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, pada biaya yang tercantum sebagaimana dalam lembar ke-2 (arsip Samsat) dan lembar ke-4 (arsip BPKPAD) wajib di setorkan oleh saksi ISMIWATY KODA selaku Bendahara Penerima ke rekening kas daerah Provinsi Maluku Utara, maka dengan dibuatnya perbedaan angka atas biaya PKB dan BBN-KB juga dengan dihilangkannya biaya BBN-KB1 (kendaraan baru) menjadi kendaraan lama antara lembar ke-1, 3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, terdapat selisih nilai uang pajak, yang dari hasil selisih uang tersebut dinikmati oleh terdakwa bersama dengan saksi ISWIWATY KODA sebagai penghasilan yang tidak sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA telah **MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH** Provinsi Maluku Utara seluruhnya sebesar **Rp. 632.930.067,-** (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada UPTB Samsat Halmahera Timur Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	
Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut : <i>Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2</i>	2.418.000,00	
<i>Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1</i>	187.378.925,00	
<i>Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi</i>	7.559.850,00	
<i>Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi</i>	34.774.560,00	
<i>Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)</i>	29.059.968,00	
Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb : melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49.688.430,00	
pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54.119.200,00	
Total Kerugian	Rp. 632.930.067,-	Rp.0,-

Perbuatan Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/ADM-MU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017, bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA (*tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **TELAH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

1. Tidak menyertakan ke kas daerah atas penerimaan uang pajak kendaraan bermotor periode bulan Februari 2018 s/d Mei 2018, dari 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan seluruhnya sebesar Rp. 186.717,509,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
2. Melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, dengan hasil uang yang diperoleh seluruhnya sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan Nilai yang sudah di kurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutaskan dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

3. Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari daerah akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Bawa terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SHAJ Bin DEDE NUCH selaku kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/ADM-MU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara untuk memimpin, menyusun kebijakan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan, akan tetapi terdakwa telah **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN** dengan cara menghilangkan, merubah dan mengurangi nilai biaya yang tercantum pada lembar ke-4 dan lembar ke-2 dalam Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor, terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA, pada kurun waktu tahun 2018 seringkali dengan kewenangannya tersebut memerintahkan saksi HARYANTO yang bekerja sebagai pegawai Honorer pada kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sebagai pembantu bendahara penerima untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, sekaligus dengan catatan angka biaya yang berbeda antara lembar-1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4.

Adapun mekanisme rangkapan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (satu) kendaraan bermotor yaitu :

- Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
- Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
- Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
- Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
- Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.

Bahwa setiap hari atas penerimaan keuangan dari pajak kendaraan bermotor yang di terima oleh UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, pada biaya yang tercantum sebagaimana dalam lembar ke-2 (arsip Samsat) dan lembar ke-4 (arsip BPKPAD) wajib di setorkan oleh saksi ISMIWATY KODA selaku Bendahara Penerima ke rekening kas daerah Provinsi Maluku Utara, maka dengan dibuatnya perbedaan angka atas biaya PKB dan BBN-KB juga dengan dihilangkannya biaya BBN-KB1 (kendaraan baru) menjadi kendaraan lama antara lembar ke-1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, terdapat selisih nilai uang pajak, yang dari selisih uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi ISWIWATY KODA mendapatkan keutungan atau menguntungkan dirinya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA telah **MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA /DAERAH** Provinsi Maluku Utara seluruhnya sebesar **Rp. 632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah)**, sebagamana hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada UPTB Samsat Halmahera Timur Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	
Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut :		
<i>Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2</i>	2.418.000,00	
<i>Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1</i>	187.378.925,00	
<i>Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi</i>	7.559.850,00	
<i>Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi</i>	34.774.560,00	
<i>Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)</i>	29.059.968,00	
Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb :		
melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49.688.430,00	
pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54.119.200,00	
Total Kerugian	Rp. 632.930.067,	Rp.0,-

Perbuatan Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH BIN DEDE NUCH**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi secara Bersama-sama memperkaya orang lain, diri sendiri atau suatu koorporasi** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH BIN DEDE NUCH**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara Bersama-sama menguntungkan orang lain, diri sendiri atau suatu koorporasi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** subsider **6 (Enam) bulan** kurungan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 432.930.067,- (Empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** kurungan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

No	Jumlah	Barang/Dokumen	Atas Nama pemilik	Keterangan
1.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
2.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
3.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RSUD MABA	DG 8100 HT
4.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4614 T
5.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4620 T
6.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
7.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET H	DG 2842 TB
8.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4644 T
9.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
10.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI	DG 5260 T
11.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
12.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
13.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
14.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
15.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
16.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANADA ISWAHYUDI	DG 2340 TD
17.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
18.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
19.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASITO	DG 6337 T
20.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
21.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
22.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
23.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
24.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIAH	DG 3992 TB
25.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
26.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	RITA SALIHI	DG 5040 TA

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWDKLLJ (lembar 4)				
27.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
28.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
29.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
30.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
31.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURWADI	DG 2011 TC
32	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
33	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
34	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
35	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
36	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASBUN	DG 3995 TB
37	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
38	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
39	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
40	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NENENG GITAWAHYUNI	DG 2068 TD
41	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
42	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
43	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
44	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
45	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
46	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASMIYEM	DG 2007 TC
48	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIMAN	DG 2003 TC
49	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SATUNI	DG 2032 TD
50	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOHNIS TERU TERU	DG 2009 TC
51	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
52	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 2086 TD
53	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
54	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISNO	DG 3961 TB
55	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
56	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRIYANI	DG 3967 TB
57	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
58	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAGIYAH	DG 2031 TD
59	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
60	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
61	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
62	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
63	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
64	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADRI POUTI	DG 3872 TB
65	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
66	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
67	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
68	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
69	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
70	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RUBIYATI	DG 2094 TD
71	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUGENG	DG 3868 TB
72	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANDI YANI	DG 3713 TB
73	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOGENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
74	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
75	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
76	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARINUS WAROBAI	DG 3927 TB
77	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ALI MUSOLIH	DG 3925 TB
78	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIFUL SETIAWAN	DG 3937 TB
79	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAESAL ALBAR	DG 3944 TB
80	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENGKI KAOCI	DG 3941 TB
81	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANWAR M. NUR	DG 3953 TB
82	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
83	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET	DG 2110 TD
84	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANDONO	DG 2113 TD
85	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
86	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
87	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	MESERI	DG 2124 TD

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWDKLLJ (lembar 4)				
88	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADE SALMAN,SKM.M,KES	DG 3774 TB
89	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KARTINI	DG 3867 TB
90	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PARWATI	DG 2080 TD
91	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
92	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RETNO	DG 2085 TD
93	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
94	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
95	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
96	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
97	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
98	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
99	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
100	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
101	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
102	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANCE ANO	DG 2148 TD
103	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
104	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
105	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
106	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
107	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDOYONO	DG 2207TD

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
109	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
110	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
111	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	THOYIBAH	DG 2119 TD
112	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
113	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
114	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
115	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAHRONI	DG 2125 TD
116	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
117	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASEHAT	DG 2139 TD
118	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGNESIA ITA PURNAMASARI	DG 3721 TB
119	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
120	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MIAN	DG 3968 TB
121	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
122	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
123	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
124	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
125	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
126	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURDIN HADI	DG 1409 T
127	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SOLATUN	DG 2201 TD
128	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
129	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIRUN	DG 3972 TB
130	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDODO	DG 2196 TD
131	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	TONY HARTONO	DG 6331 T
132	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099 TU
133	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
134	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANISA UAT	DG 1297 T
135	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
136	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
137	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
138	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
139	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
140	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUSANA	DG 8001 UT
141	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
142	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTIYAH	DG 8187 T
143	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
144	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
145	1 (satu) lembar Asli 1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H.J. SITI MAWANI	DG 8506 T
146	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
147	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
148	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SUTRISMAN	DG 8510 T

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
149	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
150	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
151	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
152	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
153	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
154	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SABINGATUN	DG 2516 T
155	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURIYONO	DG 6207 7
156	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 5488 T
157	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SALIM	DG 5334 T
158	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAHYU NINGSIA BAHRUDIN	DG 2760 TA
159	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
160	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 5)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
161	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASTAM	DG 2331 TB
162	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MISITUN	DG 8102 T
163	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
164	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
165	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UDIN ALI	DG 5075 T
166	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
167	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
168	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
170	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
171	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
172	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
173	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
174	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKIR	DG 2966 TA
175	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIADI	DG 8052 T
176	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
177	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
178	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SABAN	DG 5390 T
179	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	GAZALI M TAHIR	DG 25II TB
180	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
181	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSINO	DG 2906 TA
182	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
183	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
184	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NAHROWI	DG 8005 UT
185	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
186	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SRIANINGSIH	DG 1401 T
187	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BAMBANG HARYANTO, Spd	DG 1400 T
188	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEI INDONESIA	DG 8502 T

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	RSUD MABA	DG 8100 HT
190	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
191	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKAD KAB. HALTIM	DG 1003 TP
192	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKD HALTIM	DG 1004 TP
193	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ABDULLAH MOLOGOTU	DG 1412 T
194	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ARIS BUDIYONO	DG 1007 UT
195	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	LATIFA DJAILAN	DG 1413 T
196	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	DINAS KESEHATAN KAB. HALTIM	DG 9001 TP
197	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUNIR Hi. SALIM	DG 1418 T
198	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1006 TP
199	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1007 TP
200	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SAFRI ANDI	DG 1012 UT
201	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MOHAMAD ALI SODIKIN	DG 1423 T
202	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUSLIM DJURUBASA	DG 1429 T
203	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SENDAI PAIDUN	DG 1412 T
204	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MAJID DJINA	DG 1437 T
205	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	AAN RIYADI	DG 1438 T
206	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ISMAIL DJURU BASA	DG 1452 T
207	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MISNAINI	DG 1461 T
208	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	YORDAN LABUANG	DG 1466 T
209	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak	BURHAN HI. ADAM	DG 1467 T

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	scan	Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)		
210	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
211	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
212	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RSUD MABA	DG 8100 HT
213	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4614 T
214	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4620 T
215	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
216	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET H	DG 2842 TB
217	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4644 T
218	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
219	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI	DG 5260 T
220	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
221	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
222	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
223	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
224	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
225	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANADA ISWAHYUDI	DG 2340 TD
226	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
227	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
228	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASITO	DG 6337 T
229	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
230	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
231	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
232	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
233	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIAH	DG 3992 TB
234	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
235	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	rita salihi	DG 5040 TA
236	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
237	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
238	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
239	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
240	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURWADI	DG 2011 TC
241	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
242	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
243	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
244	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
245	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASBUN	DG 3995 TB
246	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
247	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
248	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
249	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
251	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
252	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
253	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
254	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
255	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
256	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASMIYEM	DG 2007 TC
257	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAIMAN	DG 2003 TC
258	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SATUNI	DG 2032 TD
259	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOHNIS TERU TERU	DG 2009 TC
260	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
261	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 2086 TD
262	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
263	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISNO	DG 3961 TB
264	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
265	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRIYANI	DG 3967 TB
266	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
267	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAGIYAH	DG 2031 TD
268	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
269	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
270	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
271	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
272	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
273	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADRI POUTI	DG 3872 TB
274	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
275	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
276	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
277	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	REYNOLD TUMALANG	DG 2104 TD
278	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
279	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RUBIYATI	DG 2094 TD
280	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUGENG	DG 3868 TB
281	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANDI YANI	DG 3713 TB
282	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
283	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
284	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
285	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENGKI KAOCI	DG 3941 TB
286	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
287	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET	DG 2110 TD
289	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANDONO	DG 2113 TD
290	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
291	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SUPARMIWATI	DG 2120 TD

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
292	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MESERI	DG 2124 TD
293	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADE SALMAN,SKM.M,KES	DG 3774 TB
294	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KARTINI	DG 3867 TB
295	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PARWATI	DG 2080 TD
296	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
297	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RETNO	DG 2085 TD
298	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
299	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
300	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
301	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
302	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
303	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
304	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
305	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
306	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
307	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANCE ANO	DG 2148 TD
308	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
309	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
310	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
311	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SENI SURYANI	DG 2116 TD

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDOYONO	DG 2207TD
313	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
314	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
315	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
316	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	THOYIBAH	DG 2119 TD
317	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
318	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
319	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
320	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAHRONI	DG 2125 TD
321	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
322	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASEHAT	DG 2139 TD
323	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
324	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MIAN	DG 3968 TB
325	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
326	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
327	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
328	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
329	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
330	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURDIN HADI	DG 1409 T
331	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SOLATUN	DG 2201 TD
332	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak		

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
333	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIRUN	DG 3972 TB
334	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDODO	DG 2196 TD
335	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	TONY HARTONO	DG 6331 T
336	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099 TU
337	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
338	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANISA UAT	DG 1297 T
339	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
340	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
341	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
342	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
343	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
344	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUSANA	DG 8001 UT
345	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
346	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTIYAH	DG 8187 T
347	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
348	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
349	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T
350	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
351	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
352	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SUTRISMAN	DG 8510 T

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)			
353	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAHRAN UAT	DG 2206 T	
354	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB	
355	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203	
356	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T	
357	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB	
358	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SABINGATUN	DG 2516 T	
359	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURIYONO	DG 6207 7	
360	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 5488 T	
361	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SALIM	DG 5334 T	
362	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAHYU NINGSIA BAHRUDIN	DG 2760 TA	
363	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA	
364	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA	
365	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASTAM	DG 2331 TB	
366	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MISITUN	DG 8102 T	
367	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T	
368	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT	
369	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UDIN ALI	DG 5075 T	
370	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	VERA TANDEAN	DG 6018 T	
371	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB	
372	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	DG 160 HT	

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)	PEMDA HALTIM	
373	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
374	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
375	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
376	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
377	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
378	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKIR	DG 2966 TA
379	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIADI	DG 8052 T
380	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
381	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
382	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SABAN	DG 5390 T
383	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	GAZALI M TAHIR	DG 25II TB
384	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
385	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSINO	DG 2906 TA
386	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
387	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
388	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NAHROWI	DG 8005 UT
389	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
390	Asli 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Januari 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
391	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan April 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
392	Copy 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Mei 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juni 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
394	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juli 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
395	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 00603974 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama RAHEL DESI RESIMARAN dengan No.Pol. DG 8024 UT dengan jumlah sebesar Rp. 31.958.000,-	
396	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 12816460 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama ABDUL RAHIM ASRI dengan No.Pol. DG 8011 UT dengan jumlah sebesar Rp. 18.931.000,-	

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH;**

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021 terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI"** Secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH sebesar Rp. 432.930.067,- (*empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam)bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Barang/Dokumen	Atas Nama pemilik	Keterangan
1.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
2.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
3.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RSUD MABA	DG 8100 HT
4.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4614 T
5.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4620 T
6.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
7.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMETH	DG 2842 TB
8.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4644 T
9.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
10.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI	DG 5260 T
11.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
12.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
13.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
14.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
15.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
16.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANADA ISWAHYUDI	DG 2340 TD
17.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSANTIADE	DG 5033 TA
18.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
19.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASITO	DG 6337 T
20.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
21.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
22.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
23.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
24.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIAH	DG 3992 TB
25.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
26.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RITA SALIHI	DG 5040 TA
27.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
28.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
29.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TELAGAJAYA	DG 2339 HT
30.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
31.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURWADI	DG 2011 TC
32	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
33	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
34	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	CUCU ASMAMA	DG 3994 TB
35	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
36	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASBUN	DG 3995 TB
37	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
38	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUHARTIMARSIDIK	DG 3996 TB
39	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
40	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD
41	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
42	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
43	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ATIKUESTINAH	DG 2006 TC
44	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LATIFADJAILAN	DG 3991 TB
45	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
46	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
47	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASMIYEM	DG 2007 TC
48	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIMAN	DG 2003 TC

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SATUNI	DG 2032 TD
50	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	JOHNISTERU TERU	DG 2009 TC
51	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
52	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 2086 TD
53	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
54	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISNO	DG 3961 TB
55	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
56	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRIYANI	DG 3967 TB
57	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
58	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAGIYAH	DG 2031 TD
59	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
60	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
61	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
62	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
63	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
64	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADRI POUI	DG 3872 TB
65	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
66	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
67	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
68	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
69	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
70	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RUBIYATI	DG 2094 TD
71	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUGENG	DG 3868 TB
72	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANDI YANI	DG 3713 TB
73	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
74	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
75	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
76	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARINUS WAROBAI	DG 3927 TB
77	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ALI MUSOLIH	DG 3925 TB
78	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIFUL SETIAWAN	DG 3937 TB
79	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAESAL ALBAR	DG 3944 TB
80	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENGKI KAOCI	DG 3941 TB
81	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANWAR M. NUR	DG 3953 TB
82	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
83	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET	DG 2110 TD
84	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANDONO	DG 2113 TD
85	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
86	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	SUPARMIWATI	DG 2120 TD

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
87	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MESERI	DG 2124 TD
88	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADE SALMAN,SKM.M,KES	DG 3774 TB
89	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KARTINI	DG 3867 TB
90	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PARWATI	DG 2080 TD
91	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
92	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RETNO	DG 2085 TD
93	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
94	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SEFETUNAMOTJOR	DG 3776 TB
95	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
96	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
97	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
98	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
99	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
100	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
101	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
102	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANCE ANO	DG 2148 TD
103	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
104	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
106	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
107	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDOYONO	DG 2207TD
108	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
109	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
110	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
111	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	THOYIBAH	DG 2119 TD
112	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
113	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
114	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
115	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAHRONI	DG 2125 TD
116	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
117	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASEHAT	DG 2139 TD
118	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGNESIA ITA PURNAMASARI	DG 3721 TB
119	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
120	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MIAN	DG 3968 TB
121	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
122	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
123	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
124	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
125	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
126	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURDIN HADI	DG 1409 T
127	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SOLATUN	DG 2201 TD
128	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
129	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIRUN	DG 3972 TB
130	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDODO	DG 2196 TD
131	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	TONYHARTONO	DG 6331 T
132	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
133	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
134	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANISA UAT	DG 1297 T
135	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
136	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
137	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
138	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
139	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
140	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUSANA	DG 8001 UT
141	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
142	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	SUTIYAH	DG 8187 T

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
143	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
144	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
145	1 (satu) lembar Asli 1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H.J. SITI MAWANI	DG 8506 T
146	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
147	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
148	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTRISMAN	DG 8510 T
149	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
150	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
151	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
152	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
153	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
154	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SABINGATUN	DG 2516 T
155	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURIYONO	DG 6207 7
156	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 5488 T
157	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SALIM	DG 5334 T
158	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAHYU NINGSIA BAHRUDIN	DG 2760 TA
159	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
160	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 5)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASTAM	DG 2331 TB
162	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MISITUN	DG 8102 T
163	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
164	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
165	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UDIN ALI	DG 5075 T
166	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
167	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
168	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
169	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
170	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
171	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
172	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
173	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
174	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKIR	DG 2966 TA
175	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIADI	DG 8052 T
176	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
177	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTARTOMAIDI, SE	DG 8509 T
178	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SABAN	DG 5390 T
179	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	GAZALIM TAHIR	DG 25II TB

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
180	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
181	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSINO	DG 2906 TA
182	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
183	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
184	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NAHROWI	DG 8005 UT
185	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
186	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SRIANINGSIH	DG 1401 T
187	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BAMBANG HARYANTO, Spd	DG 1400 T
188	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
189	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	RSUD MABA	DG 8100 HT
190	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
191	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKAD KAB. HALTIM	DG 1003 TP
192	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKD HALTIM	DG 1004 TP
193	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ABDULLAH MOLOGOTU	DG 1412 T
194	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ARIS BUDIYONO	DG 1007 UT
195	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	LATIFA DJAILAN	DG 1413 T
196	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	DINAS KESEHATAN KAB. HALTIM	DG 9001 TP
197	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUNIR Hi. SALIM	DG 1418 T

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1006 TP
199	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1007 TP
200	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SAFRI ANDI	DG 1012 UT
201	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MOHAMAD ALI SODIKIN	DG 1423 T
202	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUSLIM DJURUBASA	DG 1429 T
203	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SENDI PAIDUN	DG 1412 T
204	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MAJID DJINA	DG 1437 T
205	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	AAN RIYADI	DG 1438 T
206	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ISMAIL DJURU BASA	DG 1452 T
207	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MISNAINI	DG 1461 T
208	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	YORDAN LABUANG	DG 1466 T
209	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BURHAN HI. ADAM	DG 1467 T
210	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
211	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
212	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RSUD MABA	DG 8100 HT
213	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4614 T
214	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4620 T
215	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
216	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMETH	DG 2842 TB

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
217	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4644 T
218	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
219	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI	DG 5260 T
220	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
221	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
222	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
223	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
224	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
225	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
226	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
227	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
228	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASITO	DG 6337 T
229	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
230	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
231	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
232	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
233	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIAH	DG 3992 TB
234	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
235	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	rita salihi	DG 5040 TA

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
236	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
237	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
238	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TELAGAJAYA	DG 2339 HT
239	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
240	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURWADI	DG 2011 TC
241	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
242	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
243	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	CUCU ASMAMA	DG 3994 TB
244	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
245	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASBUN	DG 3995 TB
246	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
247	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUHARTIMARSIDIK	DG 3996 TB
248	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
249	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NENENG WAHYUNI	DG 2068 TD
250	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
251	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
252	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ATIKUESTINAH	DG 2006 TC
253	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LATIFADJAILAN	DG 3991 TB

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
255	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
256	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASMIYEM	DG 2007 TC
257	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAIMAN	DG 2003 TC
258	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SATUNI	DG 2032 TD
259	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOHNISTERU TERU	DG 2009 TC
260	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
261	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 2086 TD
262	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
263	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISNO	DG 3961 TB
264	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
265	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRIYANI	DG 3967 TB
266	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
267	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAGIYAH	DG 2031 TD
268	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
269	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
270	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
271	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
272	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
273	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADRI POUI	DG 3872 TB
274	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
275	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
276	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
277	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
278	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DARLISA HI ALI	DG 2093 TD
279	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RUBIYATI	DG 2094 TD
280	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUGENG	DG 3868 TB
281	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANDI YANI	DG 3713 TB
282	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
283	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
284	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
285	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENGKI KAOCI	DG 3941 TB
286	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
287	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET	DG 2110 TD
289	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANDONO	DG 2113 TD
290	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
291	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
292	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	MESERI	DG 2124 TD

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
293	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADE SALMAN,SKM.M,KES	DG 3774 TB
294	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KARTINI	DG 3867 TB
295	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PARWATI	DG 2080 TD
296	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
297	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RETNO	DG 2085 TD
298	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
299	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
300	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
301	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
302	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
303	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
304	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FITRIANIHUSIN	DG 2144 TD
305	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
306	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
307	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANCE ANO	DG 2148 TD
308	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
309	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
310	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
312	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDOYONO	DG 2207TD
313	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
314	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
315	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
316	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	THOYIBAH	DG 2119 TD
317	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
318	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
319	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
320	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAHRONI	DG 2125 TD
321	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUAIB H. TAMSI	DG 2082 TD
322	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASEHAT	DG 2139 TD
323	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
324	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MIAN	DG 3968 TB
325	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
326	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
327	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
328	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
329	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
330	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURDIN HADI	DG 1409 T
331	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SOLATUN	DG 2201 TD
332	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
333	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIRUN	DG 3972 TB
334	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDODO	DG 2196 TD
335	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	TONYHARTONO	DG 6331 T
336	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
337	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
338	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANISA UAT	DG 1297 T
339	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
340	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
341	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
342	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
343	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
344	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUSANA	DG 8001 UT
345	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
346	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTIYAH	DG 8187 T
347	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
348	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	SRI ASTINI	DG 8002 UT

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
349	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T
350	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
351	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
352	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTRISMAN	DG 8510 T
353	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
354	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
355	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DG 2203
356	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
357	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
358	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SABINGATUN	DG 2516 T
359	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURIYONO	DG 6207 7
360	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 5488 T
361	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SALIM	DG 5334 T
362	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAHYU NINGSIA BAHRUDIN	DG 2760 TA
363	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
364	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
365	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASTAM	DG 2331 TB
366	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MISITUN	DG 8102 T

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
367	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
368	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
369	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UDIN ALI	DG 5075 T
370	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
371	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
372	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
373	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
374	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
375	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
376	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
377	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
378	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKIR	DG 2966 TA
379	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIADI	DG 8052 T
380	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
381	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
382	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SABAN	DG 5390 T
383	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	GAZALIM TAHIR	DG 25II TB
384	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
385	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak	MARSINO	DG 2906 TA

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
386	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
387	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
388	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NAHROWI	DG 8005 UT
389	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
390	Asli 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Januari 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
391	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan April 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
392	Copy 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Mei 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
393	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juni 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
394	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juli 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
395	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 00603974	dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama RAHEL DESI RESIMARAN dengan No.Pol. DG 8024 UT dengan jumlah sebesar Rp. 31.958.000,-		
396	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 12816460	dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama ABDUL RAHIM ASRI dengan No.Pol. DG 8011 UT dengan jumlah sebesar Rp. 18.931.000,-		

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (*Lima ribu rupiah*);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021, serta Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 16 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/ Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021 tersebut;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021 dan Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021, dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021, dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada Penasihat Hukum terdakwa dengan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 17 Maret 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 23 Maret 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021 dengan alasan:

- bahwa Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan secara lengkap, tidak memperhatikan persesuaian keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa dengan lainnya, tidak pula mempertimbangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum;

- bahwa meskipun Terdakwa menyampaikan mohon keringanan dalam Pembelaannya itu bukan berarti Terdakwa mengakui semua kerugian Negara yang terjadi merupakan perbuatan Terdakwa seluruhnya, akan tetapi ada peran Bendahara dan orang lain alias Pegawai Honor yang bertugas sebagai operator pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur;
- bahwa dengan tidak terpenuhi hal-hal diatas maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama ZULWAHYU USMAN A. SJAH Bin DEDE NUCH, justru yang objektif dalam memberikan tuntutan adalah saudara Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hal mana sangat berlainan dengan majelis hakim yang dalam putusannya sangat subjektif dari kondisi objektif yang sesungguhnya yang tentunya putusan mana sangat memberatkan bagi Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat menjatuhkan putusan Menolak permohonan banding yang dilakukan oleh terdakwa dan mengambil alih putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021 dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meniliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid-Sus/TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021, beserta bukti – buktinya dan memperhatikan alasan – alasan memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara benar menurut hukum, dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, telah pula tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang apa yang diuraikan dalam memori bandingnya karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama dalam persidangan karena Terdakwa telah terbukti menikmati harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa dari sejumlah perhitungan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp.632.930.067,-(enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) dalam perkara terpisah Terdakwa Ismiwati Koda telah mengakui menikmati sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari jumlah kerugian negara tersebut diatas, sehingga sisanya sejumlah Rp.432.930.067,-(empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa Zulwahyu A. Usman Sjah Bin Dede Nuch untuk keperluan pribadi sesuai pengakuan Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pidana yang dijatuhan tersebut sudah tepat dan patut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut serta pemberian efek jera dan efek pencegahan bagi tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang tepat dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 Maret 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka lamanya terdakwa dalam tahanan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami **AMIN SUTIKNO, S.H., M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **Dr. JONNER MANIK, S.H., MM.** dan **H. MAHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **M. IKBAL DAUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

ttd

H. MAHSAN, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

AMIN SUTIKNO, S.H. M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah,
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CHANDRA SUTIANTIO TOLUWA, SH
NIP. 19630103 199303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)